

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Reformasi yang bergulir pada tahun 1998 telah membuat perubahan politik dan administrasi di Indonesia, salah satu bentuk reformasi tersebut adalah perubahan bentuk pemerintahan yang semula sentralis menjadi bentuk pemerintahan yang terdesentralisasi dengan diberlakukan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan terakhir diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi mempunyai arti bahwa adanya penyerahan kewenangan pemerintahan, dari Pemerintahan Pusat kepada Pemerintah Daerah (daerah otonom) berdasarkan asas otonomi. Tujuan ekonomi yang hendak dicapai lewat desentralisasi merupakan mewujudkan kesejahteraan lewat penyediaan pelayanan publik yang lebih menyeluruh serta memperkecil jarak antara penyedia layanan publik serta masyarakat lokal, Selain itu juga diharapkan dapat menciptakan proses pengambilan keputusan publik secara demokratis (Rihardjo, 2021).

Pelaksanaan otonomi daerah yang menitik beratkan pada daerah Kabupaten dan Kota ditandai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumberdaya yang dimiliki untuk belanja- belanja daerah dengan menganut asas kepatuhan,kebutuhan, dan kemampuan daerah yang tercantum dalam anggaran daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan rencana keuangan tahunan Pemda yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi Pemda dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran. APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, Hal tersebut menegaskan bahwa Pemda memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber

daya yang dimiliki untuk belanja daerah dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan dan kemampuan daerah yang tercantum dalam anggaran daerah. Dalam era desentralisasi fiskal sekarang ini, diharapkan adanya peningkatan fasilitas di berbagai sektor terutama sektor publik, hal ini dikarenakan dari semakin banyaknya permintaan dari masyarakat akan pelayanan publik maupun barang publik yang diberikan oleh pemerintah dan dampak lainnya akan meningkatkan daya tarik bagi investor untuk menanamkan investasinya di daerah yang nantinya akan memajukan pembangunan suatu daerah (Kusnandar dan Siswantoro, 2016).

Salah satu bentuk otonomi daerah adalah dalam hal pengelolaan anggaran belanja daerah. Belanja daerah dipisahkan dua bentuk yang terbagi atas Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi yang hakekatnya merupakan biaya (expense) untuk membiayai kegiatan non investasi yang memiliki kegunaan kurang dari 1 tahun, sedangkan Belanja Modal dalam pengertiannya merupakan belanja investasi berupa biaya yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun (Mahmudi, 2015). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang sistem Akuntansi Pemerintahan, ditegaskan bahwa belanja modal ini merupakan alokasi pengeluaran anggaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Kaitannya dengan peningkatan penerimaan daerah, Belanja Modal memiliki peranan yang amat penting terkait dengan peningkatan sarana dan prasarana publik pada suatu daerah. Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan Pemda dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik yang dapat dilakukan dengan peningkatan investasi modal bentuk aset tetap, yaitu peralatan, pembangunan, infrastruktur dan harta dalam tetap lainnya Undang-Undang No. 32 Thn 2004 yang berisi tentang pemerintah Daerah memberikan kewenangan penuh bagi tiap-tiap daerah baik provinsi, kabupaten/kota untuk membenahi dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan pemerintah pusat ke daerah. Transferan dari pemerintah pusat yang berbentuk DBH, DAU dan DAK tersebut merupakan sumber utama pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintah sehari-hari dengan

tujuan mengurangi kesenjangan fiscal dengan daerah lain dan menyakinkan terlaksananya standar pelayanan publik (Kusnandar dan Siswanto, 2016).

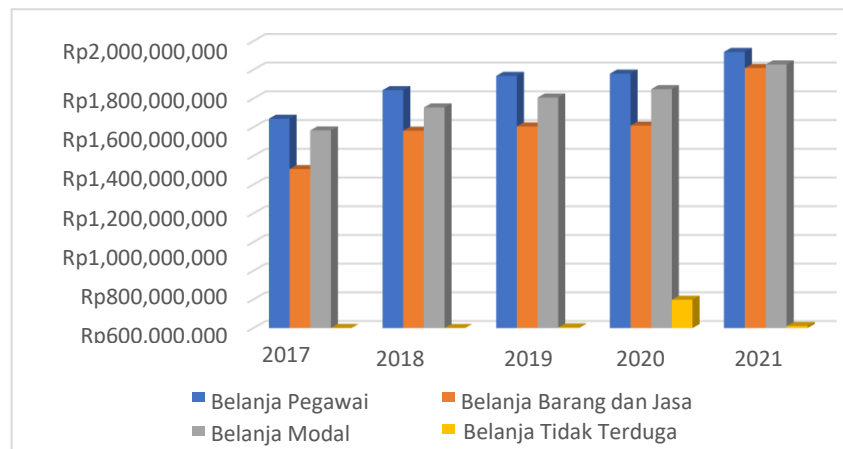
Fenomena yang terjadi pada provinsi di pulau sumatera menunjukkan belanja modal merespon secara cepat informasi yang membuat bursa saham menjadi semakin peka terhadap peristiwa disekitarnya. Studi peristiwa merupakan studi yang mempelajari reaksi belanja modal terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Jika pengumuman mengandung informasi, maka diharapkan pasar modal Akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh belanja modal. Secara empiris, pengujian umum terhadap respon atau reaksi belanja modal adalah menggunakan indikator pendapatan asli daerah (PAD) di pulau sumatera (Suganda, 2018:2).

Reaksi ini dapat diukur dengan menggunakan Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebagai nilai perubahan harga atau dengan menggunakan Pendapatan asli daerah (PAD). Jika digunakan Pendapatan Asli daerah (PAD), maka dapat dikatakan bahwa suatu pengumuman yang mempunyai kandungan informasi Akan memberikan Pendapatan asli daerah kepada belanja modal. Sebaliknya yang tidak mengandung informasi tidak memberikan pendapatan asli daerah kepada belanja modal (Hartono, 2015). Selain menggunakan return saham sebagai informasi, reaksi belanja modal juga dapat diukur melalui parameter pergerakan Dana Alokasi Khusus (DAK) di pasar. Analisis Dana alokasi khusus dilakukan untuk melihat reaksi belanja modal terhadap informasi melalui parameter pergerakan aktivitas. Volume perdagangan di pasar dan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang reaksi belanja modal. Apabila setelah terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan volume perdagangan saham meningkat maka informasi yang dikeluarkan merupakan informasi positif, sebaliknya apabila volume perdagangan menurun maka informasi yang dikeluarkan merupakan informasi negatif. Penggunaan Dana alokasi khusus untuk mengukur reaksi belanja modal.

Dalam penelitian ini peristiwa yang Akan diuji kandungan informasinya terhadap belanja modal adalah pengaruh belanja modal pada provinsi di pulau

sumatera. Apabila informasi atau peristiwa tersebut memberikan hasil yang positif bagi belanja modal, maka Akan dihasilkan pendapatan asli daerah yang lebih besar dari pendapatan yang diharapkan. Namun sebaliknya jika informasi atau peristiwa tersebut memberikan hasil yang negatif bagi pasar modal, maka Akan dihasilkan pendapatan yang lebih kecil dari pendapatan yang diharapkan. Selain menggunakan pendapatan asli daerah belanja modal juga diamati dengan melihat aktivitas volume Dana alokasi khusus.

Penelitian ini nantinya Akan memilih pasar modal yang terdaftar pada provinsi di sumatera selatan pada saat periode terjadinya peristiwa tersebut. Pemilihan indeks provinsi di sumatera selatan sebagai objek penelitian karena indeks ini terdiri atas 17 kabupaten/kota yang memiliki kinerja keuangan yang baik dan likuiditas transaksi yang tinggi. Jadi dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dilihat reaksi belanja modal secara umum terhadap peristiwa yang mempengaruhi pasar modal pada provinsi di pulau sumatera. Peristiwa tersebut dapat dilihat melalui gambar proporsi belanja modal pada provinsi di pulau sumatera tahun 2017 – 2021.



Sumber: Data yang diolah (2023)

Gambar 1.1
Rincian Proporsi Belanja modal Pada Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2017 – 2021

Berdasarkan dari data Gambar 1.1 di atas dapat dilihat bahwa belanja modal pada provinsi di pulau sumatera berfluktuasi pada tahun 2017 – 2021. Belanja pegawai pada provinsi di pulau sumatera pada tahun 2021 menduduki posisi tertinggi jika dibandingkan dengan keempat tahun lainnya. Tahun 2021 belanja pegawai di pulau sumatera mencapai angka sebesar Rp 2.000.000.000 dan pada tahun 2018, 2019 dan 2020 mencapai angka sebesar Rp 1.800.000.000. Sedangkan tahun yang memiliki belanja pegawai terendah di tahun 2017 yaitu sebesar Rp 1.600.000.000. Belanja Barang dan Jasa pada provinsi di pulau sumatera pada tahun 2021 menduduki posisi tertinggi jika dibandingkan dengan keempat tahun lainnya. Tahun 2021 belanja barang dan jasa di pulau sumatera mencapai angka sebesar Rp 1.800.000.000 dan pada tahun 2018, 2019 dan 2020 mencapai angka sebesar Rp 1.600.000.000. Sedangkan tahun yang memiliki belanja barang dan jasa terendah di tahun 2017 yaitu sebesar Rp 1.400.000.000.

Belanja Modal pada provinsi di pulau sumatera pada tahun 2021 menduduki posisi tertinggi jika dibandingkan dengan keempat tahun lainnya. Tahun 2021 belanja modal di pulau sumatera mencapai angka sebesar Rp 2.000.000.000 dan pada tahun 2020 mencapai angka sebesar Rp 1.800.000.000. Sedangkan tahun 2018 – 2019 sebesar Rp 1.600.000.000, dan yang memiliki belanja modal paling rendah di tahun 2017 yaitu sebesar Rp 1.400.000.000. Belanja Tidak Terduga pada provinsi di pulau sumatera pada tahun 2020 menduduki posisi tertinggi jika dibandingkan dengan keempat tahun lainnya. Tahun 2020 Belanja tidak terduga di pulau sumatera mencapai angka Rp 800.000.000 dan pada tahun 2017, 2018, 2019 dan 2021 menurun drastis Belanja Tidak terduga yaitu sebesar Rp 600.000.

Isu tentang belanja modal merupakan salah satu isu yang mendapat perhatian khusus oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kondisi pandemi memaksa pemerintah untuk melakukan penghematan yang memangkas pagu belanja pemerintah dengan jumlah yang cukup signifikan. Salah satu instrumen kebijakan fiskal dalam mempengaruhi perekonomian adalah melalui sektor pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah tersebut bertujuan untuk

menyediakan barang dan jasa, serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta. Dalam penelitiannya mengenai hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Modal di Kabupaten Aceh Tenggara bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal (Odilian dan Juliansyah, 2019). dalam penelitian lainnya bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh signifikan pada Belanja Modal, Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh negatif pada Belanja Modal, dan Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh positif pada Belanja Modal (Zais, 2017).

Penelitian ini memiliki beda dari penelitian sebelumnya yang dimana pada penelitian ini variabel yang digunakan yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal dan memiliki perbedaan objek yang dimana penelitian ini menggunakan objek Belanja Modal Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal pada provinsi di Pulau Sumatera.

Dengan adanya pernyataan diatas, penulis akan melakukan pertimbangan dengan tinjauan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang meneliti tentang faktor-faktor yang memengaruhi belanja modal di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan pertimbangan sebelumnya, maka peneliti melanjutkan penelitian dengan judul **“FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA MODAL PADA PROVINSI DI PULAU SUMATERA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh kepada Belanja Modal Pada

Provinsi di Pulau Sumatera?

2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh Kepada Belanja Modal Pada Provinsi di Pulau Sumatera?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh Kepada Belanja Modal Pada Provinsi di Pulau Sumatera?
4. Apakah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh Kepada Belanja Modal Pada Provinsi di Pulau Sumatera?
5. Apakah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) berpengaruh Kepada Belanja Modal Pada Provinsi di Pulau Sumatera?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah terfokus pada Belanja Modal laporan keuangan Provinsi di Pulau Sumatera dengan meneliti lebih lanjut mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada Provinsi di Pulau Sumatera dengan rentang periode 2017-2021.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk :

1. Mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Pada Provinsi di Pulau Sumatera.
2. Mengetahui Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Pada Provinsi di Pulau Sumatera.
3. Mengetahui Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Pada Provinsi di Pulau Sumatera.

4. Mengetahui Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal Pada Provinsi di Pulau Sumatera.
5. Mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal Pada Provinsi di Pulau Sumatera.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dapat memberikan :

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak perpustakaan sehingga dapat meningkatkan wawasan bagi pembaca.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan belanja modal.
3. Hasil penelitian dapat di jadikan bahan masukan kepada pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber-sumber belanja modal.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat landasan teori yang menjelaskan sebagai pendukung perumusan hipotesis, Dalam bab ini juga menguraikan terkait penelitian – penelitian yang relevan. Selain itu dalam bab ini juga telah dijelaskan terkait kerangka berfikir dan hipotesis yang dirumuskan dari pemikiran tersebut.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang alur penelitian yang dilakukan. Terdiri dari

lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, variable penelitian, definisi operasional, dan metode analisis yang akan digunakan.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran saran umum penelitian, pengujian dan hasil analisis data, serta pembahasan hasil analisis data atau yang biasa kita jumpai sebagai bukti hipotesis.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran-saran.